

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VII B2
Tentang

HUKUM ZAKAT SAHAM



A. Deskripsi Masalah

Di era modern ini, kepemilikan harta tidak lagi berbentuk fisik semata. Ada sebagian harta yang dalam wujud virtual hingga lembaran pernyataan yang berisi informasi kepemilikan tertentu. Salah satu contohnya adalah saham yang diperjualbelikan di bursa efek. Saham adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang atau aset perusahaan. Saham merupakan tanda keikutsertaan seseorang dalam permodalan suatu perusahaan atau unit bisnis. Dengan demikian saham yang nilainya telah mencapai nishab, wajib dikeluarkan zakat.

Perusahaan dan saham menjadi sektor dalam perekonomian modern yang memiliki potensi zakat yang sangat besar. Namun, praktik pemungutan zakat dari perusahaan dan saham masih menjadi perdebatan di antara para cendekiawan muslim yang disebabkan dengan semakin kompleksnya bentuk perusahaan terutama terkait komposisi kepemilikan yang semakin beragam.

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah saham termasuk harta benda yang wajib dizakati?
2. Jika ya, apa apa kriteria dan ketentuan zakat saham?
3. Siapa Yang mengeluarkan zakat saham?

4. Apa ketentuan *nishab* dan kadar zakat saham?

C. Ketentuan Hukum

1. Saham termasuk harta benda yang wajib dizakati dengan ketentuan;
 - a) Pemilik saham orang Islam;
 - b) Dimiliki dengan kepemilikan yang sempurna;
 - c) Telah mencapai *nishab*;
 - d) Telah mencapai masa *hawalan al-haul* (setahun);
 - e) Persyaratan mencapai *haul* tidak diberlakukan untuk pemegang saham perusahaan: bidang pertanian, peternakan, dan harta karun (*rikaz*).

2. Kriteria Saham Syariah Di Indonesia
 - a) Jenis Saham Biasa (*al-ashum al-'adiyah/Common Shares*) dan bukan dalam jenis Saham Preferen (*al-ashum al-mumtazah/Preferred Shares*);
 - b) Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
 - c) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen);
 - d) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
 - e) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan (*cleansing*) dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.

3. Pihak yang Mengeluarkan Zakat Saham dan Batasan Haul
 - a) Pemegang saham adalah pihak yang wajib mengeluarkan zakat saham yang dimilikinya;

- b) Pemegang saham boleh mewakilkan kepada perusahaan untuk mengeluarkan zakat saham atas namanya;
 - c) Perusahaan yang telah mengeluarkan zakat, kewajiban zakat atas para pemegang saham telah gugur;
 - d) Penentuan haul zakat saham mengacu kepada perhitungan kalender hijriyah.
4. Cara Mengeluarkan Zakat Saham
- Zakat saham dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Jika saham yang dimiliki itu dimaksudkan untuk diperjualbelikan (*trading/mutajarah*), ketentuan zakatnya mengikuti aturan zakat perdagangan, baik *nishab* maupun kadarnya yang penghitungannya sesuai nilai pasar saham saat *haul*;
 - b) Jika saham yang dimiliki dimaksudkan untuk investasi jangka panjang, cara mengeluarkannya sebagai berikut:
 - 1) Saham perusahaan industri, jasa dan ekstraktif, zakatnya mengikuti zakat *al-mustaghallat*, dengan ketentuan:
 - *Nishab* dan kadarnya mengikuti ketentuan zakat emas;
 - Penghitungannya dari keuntungan bersih saham.
 - 2) Jika sahamnya adalah saham perusahaan pertanian, ketentuannya mengacu kepada zakat pertanian;
 - 3) Jika sahamnya adalah saham perusahaan perdagangan, zakatnya mengikuti ketentuan zakat perdagangan (*urudh al-tijarah*).

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*, antara lain:
 - a. QS. Al-Baqarah [2]: 43:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

“dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat...”

b. QS. Al-Taubah [9]: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا...

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...”

c. QS. Al-Ma'arij [70]: 24:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.”

d. QS. Al-Taubah [9]: 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ...

“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi...”

2. Hadis-hadis Nabi Shallallahu 'alaihi wasallama, antara lain:

a. Hadis al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ
وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; ‘Islam dibangun di atas lima perkara; persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke (Baitullah) dan puasa Ramadhan.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

- b. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallama Riwayat Ibnu Majah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ

“Diriwayatkan dari ‘Aisyah Ra ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda; ‘Tidak ada kewajiban zakat dalam suatu harta sehingga telah tiba masa haul-nya.”

- c. Hadis Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallama riwayat al-Bukhari-Muslim:

عَنْ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ...

“Diriwayatkan dari Abi Hafsh ‘Umar bin al-Khaththab Ra ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu

'alaihi wa sallam bersabda: 'Sempurnanya amal tergantung niatnya...''

3. Kaidah Fikih, antara lain:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

"Segala sesuatu tergantung tujuannya"

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

"Kesulitan akan menarik kemudahan"

4. Pendapat Ulama, antara lain:

a. Pendapat Muhammad al-Khathib al-Syarbini dalam *Mughni al-Muhtaj*:

وَ شَرْعًا اسْمٌ لِقَدْرِ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ
صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ بِشَرَائِطَ

"Zakat menurut syara` adalah nama bagi kadar tertentu dari sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu." (Muhammad al-Khathib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, [Bairut: Dar al-Fikr, tt], juz, I, h. 368)

b. Pendapat Ibnu Hajib sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad ash-Shawi dalam *Bulgha as-Salik Li Aqrab al-Masalik*:

أَخْتَلَفَ فِي الْمَلِكِ التَّامِّ ، قِيلَ سَبَبٌ لَوْجُوبِ الزَّكَاةِ لَا شَرْطُ
؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ ، وَمِنْ وُجُودِهِ وُجُودُ
السَّبَبِ بِالنَّظَرِ لِنَدَاتِهِ ، وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ : إِنَّهُ شَرْطٌ نَظْرًا

إِلَى الظَّاهِرِ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَلَا يَلْزَمُ
مِنْ وُجُودِهِ

“Dalam hal al-milk al-tamm telah diperselisihkan para ulama. Dalam satu pendapat dikatakan bahwa al-milk al-tamm adalah sebab wajibnya zakat bukan syarat. Alasannya ketiadaan al-milk al-tamm mengharuskan ketiadaan kewajiban zakat dan keberadaanya mengharuskan adanya akibat (kewajiban zakat) dengan melihat kepada dzatnya. Sementara menurut Ibn al-Hajib al-milk al-tamm adalah syarat karena melihat dari zhahirnya, yaitu bahwa ketiadaannya mengharuskan ketiadaan kewajiban zakat dan keberadaanya tidak mengharuskan kewajiban zakat.” (Ahmad al-Shawi, *Bulghah al-Salik Li Aqrab al-Masalik*, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1995 M], juz, I, h. 378).

- c. Pendapat Manshur al-Bahuti dalam *Kasysyaf al-Qina’ ‘An Matn al-Iqna’*:

الرَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الرِّكَاتِ (تَمَامُ الْمِلْكِ) فِي الْجُمْلَةِ ، قَالَ فِي
الْفُرُوعِ لِأَنَّ الْمِلْكَ النَّاقِصَ لَيْسَ نِعْمَةً كَامِلَةً وَهِيَ إِنَّمَا تَجِبُ
فِي مُقَابَلَتِهَا ، إِذِ الْمِلْكُ التَّامُّ عِبَارَةٌ عَمَّا كَانَ بِيَدِهِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ
غَيْرُهُ ، يَتَصَرَّفُ فِيهِ عَلَى حَسَبِ اخْتِيَارِهِ وَفَوَائِدُهُ حَاصِلَةٌ
لَهُ

“Syarat zakat yang keempat adalah (kepemilikan yang sempurna) secara umum-sebagaimana dikatakan Ibnu Muflih di dalam kitab al-Furu’-karena kepemilikan yang kurang bukanlah kenikmatan yang sempurna, sementara zakat hanya wajib pada bandingannya. Sebab, kepemilikan yang sempurna adalah ungkapan tentang sesuatu yang ada pada kekuasaan seseorang

yang mengesampingkan pihak lain, ia dapat mentasharrufkan sesuai dengan kehendak pilihannya, dan manfaat sesuatu itu kembali untuk dirinya.” (Manshur al-Bahuti, *Kasysyaf al-Qina` ‘An Matn al-Iqna`* [Bairut: Dar al-Fikr, 1402 H], juz, II, h. 170).

- d. Pendapat ‘Alauddin al-Kasani dalam *Bada’i ash-Shana’i Fi Tartib al-Syara’i*:

وَمِنْهَا كَوْنُ الْمَالِ نَامِيًا لِأَنَّ مَعْنَى الزَّكَاةِ وَهُوَ النَّمَاءُ لَا يَحْصُلُ
إِلَّا مِنَ الْمَالِ النَّامِيِ وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ حَقِيقَةَ النَّمَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ
غَيْرُ مُعْتَبَرٍ وَإِنَّمَا نَعْنِي بِهِ كَوْنَ الْمَالِ مُعَدًّا لِلِاسْتِنْمَاءِ
بِالتَّجَارَةِ أَوْ بِالإِسَامَةِ لِأَنَّ الإِسَامَةَ سَبَبٌ لِحُصُولِ الدَّرِّ
وَالنَّسْلِ وَالسِّمَنِ وَالتَّجَارَةَ سَبَبٌ لِحُصُولِ الرِّيحِ

“Di antara syarat harta yang wajib dizakati adalah harta itu berkembang karena makna zakat sendiri, yaitu berkembang, hanya dapat terjadi dari harta yang berkembang. Dalam konteks ini yang kami maksudkan dengan “berkembang” bukanlah dalam pengertian riil (*haqiqah an-nama`*) sebab bukan hal itu yg dilihat. Tetapi yang kami maksudkan adalah harta tersebut dipersiapkan untuk dikembangkan (*diinvestasikan, pent*) dengan diperdagangkan atau dengan dilepaskan di padang rumput, karena pengembalaan (*hewan seperti sapi dan kambing di padang rumput, pent*) itu menjadi sebab peningkatan susu, keturunan dan penggemukan. Sementara perdagangan menjadi sebab memperoleh keuntungan.” (‘Alauddin al-Kasani, *Bada’i ash-Shana’i Fi Tartib asy-Syara’i*, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1982], Juz, II, h. 11).

- e. Pendapat Ibnu Juzayy dalam *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*:

وَتَنْقَسِمُ الْعُرُوضُ إِلَى أَرْبَعَةٍ أَفْسَامٍ لِلْقِنِيَةِ خَالِصًا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ إِجْمَاعًا وَالتَّجَارَةَ خَالِصًا فَفِيهِ الزَّكَاةُ خِلَافًا لِلظَّاهِرِيَّةِ وَلِلْقِنِيَةِ وَالتَّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَلِلْغَلَّةِ وَالْكَرَاءِ...

“Komoditas terbagi menjadi empat; (1) Komoditas yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan (al-qinyah) secara murni, menurut ijmak ulama harta ini tidak dikenakan zakat. (2) Komoditas yang murni untuk diperdagangkan, harta ini dikenakan zakat kecuali menurut pandangan Zhahiriyah. (3) Komoditas gabungan antara untuk dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan diperdagangkan, harta ini tidak dikenakan zakat kecuali menurut Asyhab. (4) Komoditas untuk dimanfaatkan hasil atau sewanya...” (Ibnu Juzayy, al-Qawanin al-Fiqhiyyah, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah], h. 78)

- f. Pendapat Muhammad Idris asy-Syafii dalam *al-Umm*:
 وَالْعُرُوضُ الَّتِي لَمْ تُشْتَرِ لِلتَّجَارَةِ مِنَ الْأَمْوَالِ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ بِأَنْفُسِهَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ دُورٌ أَوْ حَمَامَاتٌ لِغَلَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ ثِيَابٌ كَثُرَتْ أَوْ قَلَّتْ أَوْ رَقِيقٌ كَثُرَ أَوْ قَلَّ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَكَذَلِكَ لَا زَكَاةَ فِي غَلَاتِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فِي يَدَيْ مَالِكِهَا

“Komoditas yang tidak dibeli untuk diperdagangkan itu tidak dikenai zakat pada sebab dirinya. Barang siapa yang memiliki rumah atau sauna untuk disewakan atau selainnya, atau memiliki pakaian baik sedikit maupun banyak atau budak baik sedikit maupun banyak maka tidak dikenai zakat. Begitu juga tidak dikenai zakat atas hasil-hasil penyewaannya sebelum

jatuh haul di tangan pemiliknya.” (Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm, [Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H], Juz, II, h. 46).

g. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*:

فَصَلِّ : وَمِنْ أَجْرِ دَارِهِ ، فَقَبِضَ كِرَاهَا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَعَنْ أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يُزَكِّيهِ إِذَا اسْتَفَادَهُ . وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ } وَلِأَنَّهُ مَالٌ مُسْتَفَادٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، فَأَشْبَهَ تَمَنَ الْمَبِيعِ

“Pasal: Barang siapa menyewakan rumahnya kemudia menerima hasil sewanya maka tidak kewajiban zakat atas orang tersebut pada hasil sewanya sebelum jatuh haul-nya. Sementara terdapat riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan ia wajib menzakati hasil sewa ketika memperolehnya. Pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam; ‘Tidak ada zakat pada harta benda sebelum tiba haul-nya’. Sebab sewa tersebut merupakan harta yang diperoleh melalui akad mu’awadlah (timbang-balik), maka seperti harga barang yang dijual (tsaman al-mabi’).” (Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, [Bairut: Dar al-Fikr, Cet Ke-1, 1405], Juz, II, h. 622)

h. Pendapat al-Mawardi dalam *al-Hawi Fi Fiqh asy-Syafi'i*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ اشْتَرَى عَرَضًا لِغَيْرِ تِجَارَةٍ فَهُوَ كَمَا لَوْ مَلَكَ بِغَيْرِ شِرَاءٍ فَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ " . قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : إِذَا اشْتَرَى

عَرَضًا لِلْقِنِيَّةِ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِنْ نَوَى بَعْدَ الشِّرَاءِ أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ ، لَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، حَتَّى يَتَّجَرَ بِهِ وَلَا يَكُونُ مُجَرَّدَ نِيَّتِهِ حُكْمٌ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، وَاسْحَاقُ بْنُ زَاهَوِيَّةٍ : يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ وَتَجْرِي فِيهِ الزَّكَاةُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحُسَيْنِ الْكِرَابِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا : لِأَنَّ عَرَضَ التِّجَارَةِ ، لَوْ نَوَى بِهِ الْقِنِيَّةَ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ فَكَذَلِكَ عَرَضُ الْقِنِيَّةِ ، إِذَا نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ جَرَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ : لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجِبَتْ فِي الْعَرَضِ لِأَجْلِ التِّجَارَةِ ، وَالتِّجَارَةُ تَصَرَّفُ وَفِعْلُ الْحُكْمِ إِذَا عُلقَ بِفِعْلٍ لَمْ يَثْبُتْ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ ، حَتَّى يَقْتَرِنَ بِهِ الْفِعْلُ

“Imam Syafii ra berkata; ‘Seandainya seseorang membeli komoditas bukan untuk diperdagangkan, maka ia seperti memiliki memiliki komoditas dengan tanpa membeli. Karenanya, bila ia berniat memperdagangkan komoditas tersebut maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.’ Imam Al-Mawardi berkomentar; ‘Demikian ini sebagai ia menyatakan; Bila seseorang membeli komoditas untuk dimanfaatkan secara pribadi dan tidak diperdagangkan (li al-qinyah) maka tidak ada kewajiban zakatnya. Karena itu bila ia berniat memperdagangkan komoditas tersebut setelah membelinya, maka komoditas itu statusnya tetap tidak untuk diperdagangkan dan tidak ada kewajiban zakat sebelum ia memperdagangkannya. (Sebab, pent) penetapan suatu hukum tidak cukup hanya dengan niat. Ini adalah pandangan Imam Malik dan Imam Abu

Hanifah. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq bin Rahaiwah berpendapat; 'Komoditas tersebut menjadi komoditas perdagangan cukup hanya dengan niat sehingga berlaku kewajiban zakatnya.' Ini adalah pendapat Imam al-Husain al-Karabisi dari kalangan kami; Alasannya adalah karena komoditas perdagangan jika pemiliknya berniat menjadikannya sebagai qinyah maka gugurlah zakatnya hanya dengan niat tersebut. Demikian ini juga berlaku bagi komoditas qinyah, jika pemiliknya berniat menjadikannya sebagai komoditas perdagangan maka berlakulah kewajiban zakatnya dengan hanya niat tersebut. (Namun menurut al-Imam al-Mawardi, pent), ini adalah pendapat yang keliru. Sebab, kewajiban zakat pada komoditas itu lebih karena diperdagangkan, sementara perdagangan adalah tasharruf atau perbuatan hukum. (Jadi, pent) ketika tahsharruf atau perbuatan hukum digantungkan dengan suatu perbuatan maka tidak cukup hanya dengan niat sebelum perbuatan tersebut menyertainya. (Al-Mawardi, al-Hawi Fi Fiqh asy-Syafi'i, [Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet Ke-1, 1414 H/1994 M], Juz, III, h. 296)

- i. Pendapat Hafizhuddin an-Nasafi sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Nujaim dalam *al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*:

وَشَرَطَ فَرَاغَهُ عَنِ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الْمَشْغُولَ بِهَا
كَالْمُعْدُومِ وَفَسَّرَهَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلِكِ بِمَا يَدْفَعُ
الْهَلَاكَ عَنِ الْإِنْسَانِ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا فَالثَّانِي كَالَّذِينَ
وَالْأَوَّلُ كَالنَّفَقَةِ وَدَوْرِ السُّكْنَى وَآلَاتِ الْحَرْبِ وَالثِّيَابِ

الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا لِدَفْعِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ وَكَالَاتِ الْحِرْفَةِ وَأَثَاثِ
الْمَنْزِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ لِأَهْلِهَا

“Penulis kitab Kanz ad-Daqa`iq Hafizhuddin an-Nasafi mensyaratkan nishab harus bersih dari pemenuhan kebutuhan pokok (al-hajah al-ashliyyah) karena harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok statusnya sebagaimana harta yang tidak ada. Ia menjelaskan maksud ‘kebutuhan pokok’ adalah sesuatu yang dapat menghindari kebinaasan manusia, baik secara faktual maupun asuntif sebagaimana terdapat dalam Syarh al-Majma’ al-Bahrain karya Ibn al-Malik. Contoh kedua, seperti hutang, sementara contoh pertama seperti nafkah, tempat tinggal, alat perang, pakaiaan yang dibutuhkan untuk menahan panas dan atau dingin, alat untuk menopang pekerjaan, perabot rumah tangga, hewan tunggangan (kendaraan/alat transportasi, pent), dan buku-buku ilmu pengetahuan bagi para intelektual.” (Ibnu Nujaim, al-Bahr ar-Ra`iq Syarhu Kanz ad-Daqa`iq, [Bairut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, Cet Ke-1, 1418 H/1998 M), Juz, II, h. 361)

- j. Pendapat Fakhruddin ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*:
قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ : الْوَاجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِحُكْمِ هَذِهِ الْآيَةِ
أَنْ يَعْتَبِرُوا فِي بُيُوعِهِمْ وَمَدَدِ دِيُونِهِمْ وَأَحْوَالِ زَكَاةِهِمْ وَسَائِرِ
أَحْكَامِهِمْ السَّنَةَ الْعَرَبِيَّةَ بِالْأَهْلَةِ ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ اعْتِبَارُ
السَّنَةِ الْعَجَمِيَّةِ وَالرُّومِيَّةِ.

“Para ulama berkata: ‘Berdasarkan ayat ini (ayat 36 surat At-Taubah), wajib bagi kaum muslimin mengacu pada perhitungan tahun Arab yang berpatokan dengan bulan sabit (hilal), baik dalam urusan jual-beli mereka,

perpanjangan jangka waktu hutang, menghitung haul zakat dan semua ketetapan hukum syariat yang berkaitan dengan mereka. Tidak boleh bagi mereka untuk mengacu kepada tahun yang digunakan bangsa asing dan Romawi.” (Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghaib, [Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Cet Ke-1, 1421 H/2000 M], Juz, XVI, h. 43)

- k. Pendapat madzhab syafii dan ulama lain yang dikemukakan oleh Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab:

قَدْ ذَكَّرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهَا إِذَا وَجِبَتْ الزَّكَاةُ وَتَمَكَّنَ مِنْ إِخْرَاجِهَا وَجَبَ الْإِخْرَاجُ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ أَخَّرَهَا أَثِمَ بِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ نَقَلَهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ أَكْثَرِهِمْ وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِيِّ وَلَهُ التَّأْخِيرُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ اِخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا فَقَالَ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْفَوْرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ عَلَى التَّرَاخِيِّ

“Kami telah mengatakan bahwa menurut madzhab kami ketika kewajiban zakat telah tiba dan muzakki bisa mengeluarkan zakat maka wajib mengeluarkan menegluarkannya saat itu juga (‘ala al-faur). Karenanya bila menunda maa ia berdosa. Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Imam Malik, Imam Ahmad, mayoritas ulama dan al-‘Abdari menukilnya dari mayoritas ulama. Sementara para ulama dari kalangan kami menukil dari Imam Abu Hanifah bahwa kewajiban zakat adalah kewajiban yang bersifat tarakhi (tidak harus saat itu juga atau boleh ditunda, pent) sehingga boleh menunda. Dalam konteks ini Al-‘Abdari berkata, bahwa para ulama dari kalangan madzhab hanafi berbeda pendapat; menurut al-Karkhi

kewajiban zakat bersifat saat itu juga atau tidak bisa tunda, sementara menurut Abu Bakr ar-Razi bersifat tarakhi.” (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab)

- l. Pendapat Mahmud Ibnu Majah al-Bukhari dalam al-Muhith al-Burhani:

وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحَوْلِ إِذَا مَلَكَ نِصَابًا عِنْدَنَا؛
لِأَنَّهُ أَدَّى بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ
نِصَابٌ نَامٍ؛ فَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى النِّصَابِ فَالنِّصَابُ قَدْ وُجِدَ؛
وَإِنْ نَظَرْنَا إِلَى النَّمَاءِ فَقَدْ وُجِدَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِسَبَبِ
النَّمَاءِ وَهُوَ الْإِسَامَةُ أَوْ التِّجَارَةُ لَا لِنَفْسِ النَّمَاءِ، وَقَدْ وُجِدَ
سَبَبُ النَّمَاءِ.

“Menurut kami, bagi muzakki boleh mensegerakan menunaikan zakat sebelum sampai haul bila nisbhab-nya telah terpenuhi. Sebab, ia menunaikannya setelah adanya sebab wajibnya zakat, karena sebab wajib adalah nishab yang berkembang. Jika kita melihat pada aspek nishab, maka nishab-nya telah terpenuhi, demikian juga ketika dilihat pada aspek berkembangnya (an-nama’), karena yang menjadi acuannya adalah sebab berkembang, yaitu penggembalaan atau perdagangan, bukan berkembang itu sendiri. Sementara telah didapati sebab berkembangnya. (Mahmud Ibnu Mazah al-Bukhari, al-Muhith al-Burhani, [Bairut: Daru Ihya` at-Turats, tt], Juz, II, h. 466)

- m. Pendapat Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni dalam *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*:

وَلَوْ أَجَرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ وَقَصَدَ بِالْأُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ
عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ تَصِيرُ مَالِ تِجَارَةٍ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةٌ

Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud ketika memperoleh upah akan dijakannya komoditas perdagangan maka upah tersebut menjadi harta perdagangan. Sebab akad sewa merupakan mu'awadhah -pertukaran-(Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, [Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, tt], Juz I, h. 145)

- n. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitsami dalam *al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra*:

يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ بَعْدَ تَمَامِ النَّصَابِ فِي غَيْرِ التِّجَارَةِ وَقَبْلَ
تَمَامِ الْحَوْلِ عَنْ عَامٍ لَا أَكْثَرَ

"Selain zakat komoditas perdagangan, boleh mensegerakan pembayaran zakatnya setelah nishabnya terpenuhi dan sebelum sempurna setahun tidak melebihi." (Ibnu Hajar al-Haitsami, al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra, [Bairut: Dar al-Fikr, tt], Juz, II, h. 42)

- o. Pendapat Muhyiddin Syarf an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

قَالَ الْغَزَالِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ إِلَّا مَالٌ حَرَامٌ مَحْضٌ فَلَا حَاجَّ
عَلَيْهِ وَلَا زَكَاةَ

"Al-Ghazali berkata, ketika tidak ada pada seseorang kecuali harta haram murni maka tidak ada kewajiban haji dan zakat." (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab,)

وَأَنَّكَ الْأَصْحَابُ عَلَىٰ أَنَّ الْخَرَاجَ الْمَأْخُودَ ظُلْمًا لَا يُقُومُ
 مَقَامَ الْعُشْرِ فَإِنْ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ عَلَيَّ أَنْ يَكُونَ بَدَلَ
 الْعُشْرِ فَهُوَ كَأَخْذِ الْقِيَمَةِ بِالْإِجْتِهَادِ وَفِي سُقُوطِ الْفَرَضِ بِهِ
 خِلَافٌ سَبَقَ فِي آخِرِ بَابِ الْخُلْطَةِ الصَّحِيحِ السُّقُوطُ وَبِهِ
 قَطَعَ الْمُتَوَلَّى وَآخَرُونَ

“Para ulama dari kalangan madzhab syafii telah sepakat bahwa kharaj yang dipungut secara sewenang-wenang tidak bisa menempati tempatnya (menggantikan, pent) ‘usyr. Karenanya jika penguasa memungut kharaj untuk menggantikan ‘usyr maka ia memungut nilainya berdasarkan ijtihad. Dalam hal pungutan tersebut menggugurkan kewajiban zakat terdapat perbedaan para ulama yang telah disebutkan dalam bab khuthah. Pendapat yang sah adalah dapat menggugurkan kewajiban zakat, demikian pendapat ini ditegaskan oleh al-Mutawalli dan ulama lainnya.”
 (Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab.*)

- p. Pendapat Muhammad Anur Syah al-Kasymiri dalam *al-‘Urfasy-Syadi Syarhu Sunani at-Tirmidzi:*

قَوْلُهُ: (وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولِ الْخِ) الْغُلُولُ فِي اللُّغَةِ: سَرِقَةٌ
 الْإِبِلِ، وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: سَرِقَةُ مَالِ الْغَنِيمَةِ، ثُمَّ
 اتَّسَعَ فِيهِ فَأُطْلِقَ عَلَىٰ كُلِّ مَالٍ خَبِيثٍ، قَالَ فِي الدَّرِّ الْمُخْتَارِ
 : إِنَّ التَّصَدَّقَ بِالْمَالِ الْحَرَامِ ثُمَّ رَجَاءَ الثَّوَابِ مِنْهُ حَرَامٌ
 وَكُفْرٌ، وَفَرَّقَ الْبَعْضُ بَيْنَ الْحَرَامِ لِعَيْنِهِ وَلِغَيْرِهِ، وَمِنْهُمْ
 الْعَلَامَةُ التَّفْتَازَانِيُّ

“Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam.: ‘Allah tidak menerima sedekah dari ghulul. Secara bahasa kata ‘al-ghulul’ artinya adalah mencuri onta. Sedang dalam istilah para fuqaha` adalah mencuri harta rampasan perang. Dalam perkembangannya kata ‘al-ghulul’ kemudian dimutlakkan untuk menunjukkan semua harta yang haram. Menurut penulis kitab ad-Durr al-Mukhtar, bahwa bersedekah dengan harta haram dan mengharapkan pahala dari sedekah tersebut adalah haram dan kafir. Sebagian ulama membedakan antara haram karena dzatnya dan haram cara memperolehnya, dan di antara mereka adalah at-Taftazani.” (Muhammad Anur Syah al-Kasymiri, al-‘Urf asy-Syadi Syarhu Sunani at-Tirmidzi, [Bairut: Daru Ihya` at-Turats, Cet Ke-1, 1425 H/2004 M], Juz, I, h. 37)

- q. Pendapat ‘Alauddin al-Ba’li (lihat) *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawi Syaikh al-Islam Ibni Taimiyyah:*

وَمَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ بِإِسْمِ الْمَكْسِ جَاَزَ دَفْعُهُ بِنِيَّةِ الزَّكَاةِ
وَتَسْقُطُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى صِفَتِهَا

“Apa yang dipungut oleh Imam (Penguasa) dengan nama maks (pajak komoditas/cukai) itu boleh diberikan dengan niat membayar zakat dan kewajiban zakatnya pun gugur meskipun tidak sesuai dengan sifat zakat itu sendiri.” (‘Alauddin al-Ba’li, al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawi Syaikh al-Islam Ibni Taimiyyah, [Bairut: Dar al-Kutub)

Ditetapkan di : Hotel Sultan Jakarta

Pada Tanggal : 06 Rabi'ul Akhir 1443 H
11 November 2021 M

PIMPINAN SIDANG
KOMISI B-2
MATERI MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH

Ketua

Wakil Ketua

Miftahul Huda

KH. Arwani Faishol

Tim Perumus:

1. Miftahul Huda
2. KH. Arwani Faishol
3. Fuad Thohari
4. Rifki Rifaat
5. H.A. Sanusi Luqman
6. Sholihin Hasan
7. Kasmidin
8. H. Rikza Maulan (DSN-MUI/online)
9. Arif Machfoed (DSN-MUI/online)